



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA YOGYAKARTA Komisi D Kawal Program Pemberdayaan Masyarakat Hingga Kesehatan



YOGYA (KR) - Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menjadi salah satu alat perlengkapan dewan yang cukup strategis. Ini karena bidang garapannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari masalah sosial, pemberdayaan, pendidikan, kebudayaan hingga kesehatan. Semangat dalam mengawal program tersebut menjadi kunci agar pembangunan yang digulirkan Walikota dan Wakil Walikota Yogya, Hasto-Wawan, dapat benar-benar tepat sasaran.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, menjelaskan visi misi Hasto-Wawan saat ini tengah dirumuskan bersama dalam rancangan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui produk hukum berupa Perda RPJMD itu lah nantinya kerangka kegiatan anggaran lima tahun ke depan bakal disuikan.

"Dalam pembahasan bersama mitra kerja terkait rencana perubahan anggaran tahun ini, sejumlah program Hasto-Wawan sudah ada yang dimasukkan. Tentu ini perlu kami apresiasi karena organisasi perangkat daerah (OPD) bisa cepat melakukan penyelesaian," tandasnya.

Beberapa program Hasto-Wawan yang bakal diomodifikasi atau berjalan pada paruh tahun kedua 2025 antara lain di bidang kesehatan yakni Satu Bidan Satu Kampung. Dinas Kesehatan sudah menyiapkan sistem manajemen yang didukung oleh OPD lain terkait. Teknis dan skemanya juga sudah diatur sehingga bisa langsung



Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat koordinasi.

diterapkan tanpa harus menunggu tahun depan.

Selain kesehatan, bidang pendidikan berupa pembiayaan gratis bagi penyandang disabilitas juga sudah bisa bergulir pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Bagi penyandang disabilitas atau anak sekolah dengan kebutuhan khusus yang tidak tertampung dalam kuota sekolah negeri, tidak perlu khawatir. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah menyiapkan skema dengan memfasilitasi di sekolah swasta melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) inklusi.

Khusus mengenai skema JPD, Darini menyebut ada skema baru bagi anak didik yang masuk dalam keluarga. Pasalnya sesuai regulasi akses JPD terutama untuk menebus tunggakan biaya sekolah di swasta hanya bisa diakses oleh keluarga langsung. Akan tetapi ada beberapa anak didik yang sudah tidak memiliki orang tua sehingga dalam KK masuk dalam keluarga lain. "Jangan sampai anak yang sudah yatim piatu tidak bisa mengakses pendidikan akibat regulasi itu. Akhirnya ada ketentuan agar menyertakan akta kematian orang tuanya bagi

Darini menambahkan program pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting untuk turut dikawal. Pasalnya, begitu Hasto-Wawan menjabat sebagai kepala daerah banyak program yang langsung digencarkan. Beberapa di antaranya bedah rumah yang kini bergulir setiap akhir pekan serta padat karya yang tidak sebatas menasar program fisik. "Bedah rumah ini bahkan tidak mengandalkan APBD melainkan kolaborasi dengan pihak lain seperti Baznas, Bank Jogja dan lainnya. Ini tentu bisa men-



Jajaran Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta rapat bersama mitra kerja.



Unsur Dinsosnakertrans rapat kerja di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta.

man dan aman dari sebelumnya," imbuhnya.

Sedangkan dalam program padat karya, selama ini memang menjadi ranah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Tetapi fokusnya pada pembenahan infrastruktur wilayah seperti talud dan jalan lingkungan. Sementara padat karya yang didorong oleh Hasto-Wawan diperluas pada aspek kebersihan sehingga tidak semata mengerjakan proyek fisik. Seperti pembersihan trotoar dari rumput liar, aksi bersih sungai dan sebagainya. Dengan pola itu maka semakin banyak kegiatan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sembari memperoleh tambahan uang saku. Terutama bagi

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap sehingga bisa memiliki daya beli yang kuat.

Sementara terkait santunan kematian, sejauh ini juga mengalami perkembangan yang semakin baik. Terutama dari aspek nominal yang diupayakan terus bertambah dari sebelumnya Rp 3 juta kini menjadi Rp 4 juta bagi setiap anggota keluarga yang meninggal dunia. Penyalurannya pun dilakukan nontunai kepada ahli waris. Bagi yang sudah tidak memiliki ahli waris maka santunan dititipkan kepada perangkat wilayah setempat yakni pihak RT atau RW untuk kepentingan pemakaman. Termasuk jika ada orang tidak dikenal atau Mr X yang

meninggal dunia, Pemkot Yogyakarta tetap melakukan fasilitasi pemakaman secara layak.

Darini pun menyampaikan, sejatinya APBD merupakan uang yang dihimpu dari rakyat serta peruntukannya pun untuk rakyat. Lembaga penyelenggara pemerintah baik Pemkot maupun DPRD hanya memiliki tugas utama dalam mengelola melalui regulasi dan program agar peruntukan anggaran tepat sasaran. Oleh karena itu jajaran Komisi D DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran maupun advokasi selalu mendukung sesuai posisinya. Sehingga setiap terjadi perbedaan pendapat tidak harus dilakukan dengan berdebat. (Dhi)



Jajaran tim eksekutif mengikuti rapat kerja bersama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta.

Hal ini karena kuota di sekolah negeri cukup terbatas sehingga perlu kerja sama dengan swasta.

yang masuk famili lain atau anak didik ikut nenek atau sanak saudara lain," urainya.

dorong masyarakat untuk lebih baik taraf hidupnya ketika tempat tinggalnya saja sudah jauh lebih ny-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005